

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKjIP TAHUN 2023**



DINAS **PERTANIAN**  
DAN **PERKEBUNAN**  
Pemerintah Provinsi  
Jawa Tengah

distanbun\_Jtg



DistanbunJtg



DistanbunJateng



[distanbun.jatengprov.go.id](http://distanbun.jatengprov.go.id)





# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023**

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	3
1.3 Isu-Isu Strategis .....	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	22
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 .....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	24
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	30
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	33
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2023 .....	41
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	42
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	46
3.2 Efisiensi Anggaran .....	72
3.3 Inovasi.....	75
3.4 Penghargaan .....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	78
4.2 Rekomendasi .....	79
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja .....	80

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Sarana Prasarana Balai Pelatihan Pertanian .....	14
Tabel 1.2 : Sarana Prasarana Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	15
Tabel 1.3 : Sarana Prasarana BBTPH Wilayah Semarang .....	15
Tabel 1.4 : Sarana Prasarana BBTPH Wilayah Surakarta .....	16
Tabel 1.5 : Sarana Prasarana BBTPH Wilayah Banyumas .....	17
Tabel 1.6 : Sarana Prasarana Balai Benih Tanaman Perkebunan .....	18
Tabel 1.7 : Sarana Prasarana Balai Perlindungan TPHP .....	20
Tabel 1.8 : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 .....	23
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan	29
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023 .....	30
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023 .....	32
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan .....	34
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	42
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	46
Tabel 3.2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 .....	47
Tabel 3.3 : Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	47
Tabel 3.4 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 ....	49
Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2023 .....	51
Tabel 3.6 : Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra .....	56
Tabel 3.7 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi yang Dilakukan Tahun 2023.....	58
Tabel 3.8 : Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	60
Tabel 3.9 : Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	62
Tabel 3.10 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	72
Tabel 3.11 : Capaian Anggaran per Belanja .....	74

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Proses Bisnis Distanbun Prov. Jateng .....	3
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah .....	5
Gambar 2.1 : Aplikasi GRMS .....	43
Gambar 2.2 : Aplikasi SIP .....	43
Gambar 2.3 : Aplikasi Agro Jowo .....	44
Gambar 2.4 : Aplikasi e-Data .....	45
Gambar 2.5 : Aplikasi SINTP .....	45
Gambar 3.1 : Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2020-2023.....	53
Gambar 3.2 : Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2020-2023.....	55
Gambar 3.3 : Bukti Dukung Penghargaan Tahun 2023 .....	77

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018-2023 serta Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Ungaran, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah



SUPRIYANTO, SP., MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671023 199703 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut, tugas dan fungsi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah terjabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Sekretariat, 5 (lima) Bidang Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Prasarana dan Sarana serta Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha) dan 7 Balai (BBTPH Wilayah Semarang, BBTPH Wilayah Banyumas, BBTPH Wilayah Surakarta, BB Tanaman Perkebunan, BPTPHP, BPSB dan Bapeltan). Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan struktur pada Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana Pasal 17 ayat (1) yaitu menjadi Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan dan Seksi Pupuk dan Pembiayaan. Selain itu pada Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha juga terdapat penyesuaian sebagaimana Pasal 45 Ayat (1) menjadi Seksi Penyuluhan dan Pelatihan, Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Mutu serta Seksi Bina Usaha.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menggerakkan sektor yang dimiliki melalui serangkaian program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan guna mencapai misi organisasi yang diukur dengan target kinerja yang akan dievaluasi pencapaiannya secara periodik.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatannya secara akuntabel, efektif, efisien, dan transparan. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP adalah pelaporan kinerja tahunan yang merupakan komponen dari instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP berisi pelaporan atas pencapaian pelayanan organisasi dan output yang dihasilkan berupa capaian dari pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sasaran pembangunan sekaligus sasaran strategis yang diperbandingkan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan publik, maka analisis kinerja diperlukan dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

LKjIP Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, LKjIP ini juga disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

## 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. Instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (tujuan dan sasaran strategis organisasi, kebijakan/program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja. dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya. Dalam implementasi pelaksanaannya diperlukan acuan hubungan kerja antar elemen/bidang yang ada dalam suatu instansi yang berupa peta proses bisnis. Peta proses bisnis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut.

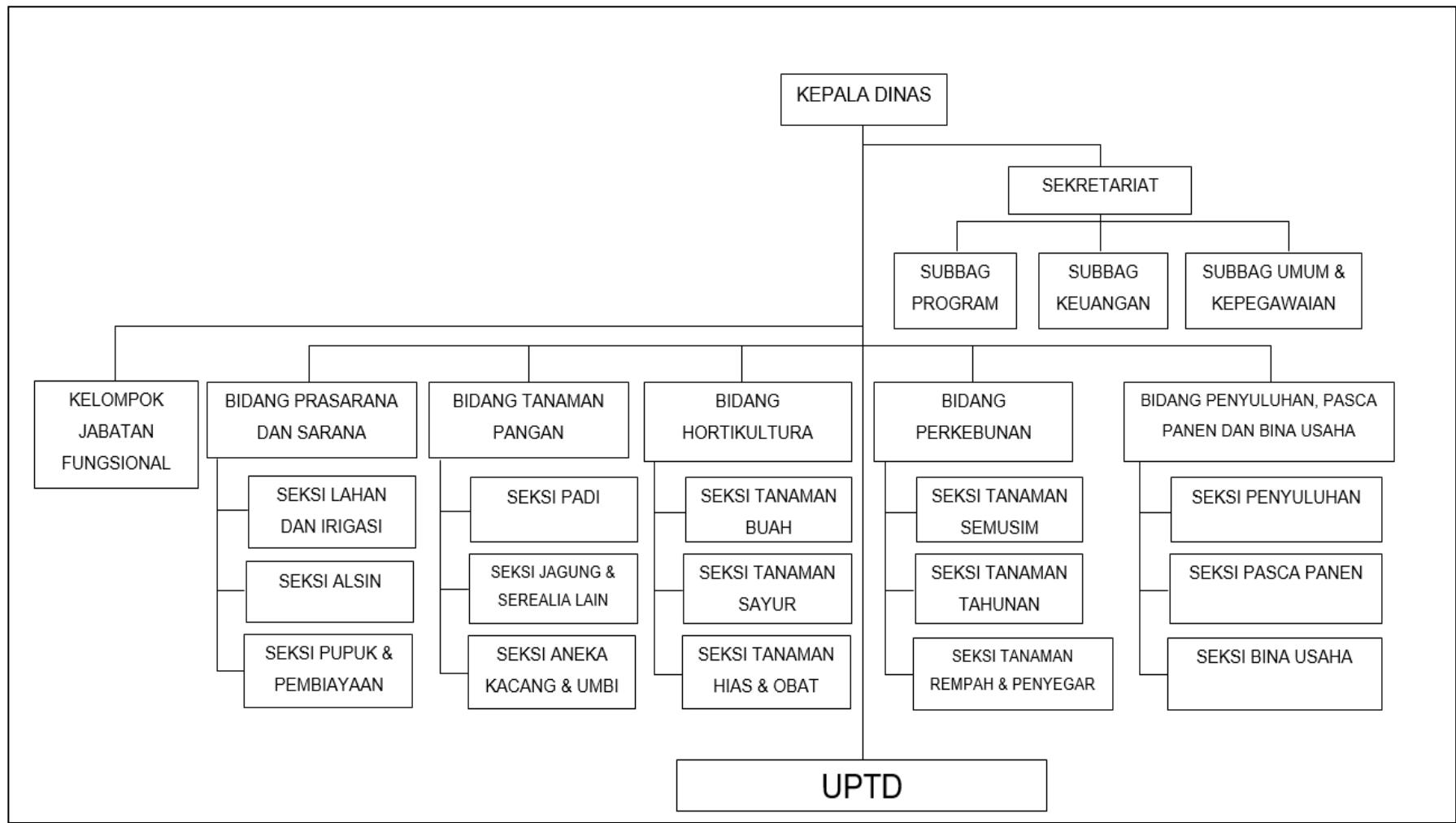


Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis Distanbun Prov. Jateng

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tentang Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun fungsinya yaitu meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 1 (satu) Kepala Dinas, 13 (tiga belas) Pejabat Administrator, dan 13 (tiga belas) Pengawas. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja selengkapnya sebagaimana uraian berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Bidang Prasarana dan Sarana**

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi, alat mesin dan pupuk dan pembiayaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat mesin;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Tanaman Pangan**

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi, jagung dan sereal lainya dan aneka kacang dan umbi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan sereal lainya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

### **4. Bidang Hortikultura**

Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran, tanaman buah serta tanaman hias dan tanaman obat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5. Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim, tanaman tahunan, rempah dan penyegar. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **6. Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha**

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pasca panen dan bina usaha. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen, pengolahan dan mutu;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha dan pemasaran; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **7. Balai Pelatihan Pertanian**

Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **8. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih**

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **9. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang bidang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **10. Balai Benih Tanaman Perkebunan**

Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang benih dan produksi tanaman perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang benih dan produksi tanaman perkebunan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang benih dan produksi tanaman perkebunan;

- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang bidang benih benih dan produksi tanaman perkebunan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **11. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal di bidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **12. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);
- c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP);
- d. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT);

- e. Jabatan Fungsional Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT);
- f. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (PAMP);
- g. Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur.

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Hasil telaah dari gambaran kondisi, permasalahan, lingkungan strategis dan dinamikan yang berkembang di sektor pertanian serta mempertimbangkan pencapaian sasaran pembangunan pertanian, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan pertanian Tahun 2023, sebagai berikut :

#### **1. Produksi Komoditas Pertanian**

Sektor pertanian merupakan sektor strategis sebagai penumpu sumber pangan. Namun dalam hal produksi komoditas pertanian masih dihadapkan pada permasalahan untuk mendapatkan penanganan. Permasalahan tersebut yaitu belum optimalnya produksi komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan utamanya kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan dan tebu dalam mendukung pencapaian Swasembada Gula Nasional. Selain itu, aspek permodalan dan perlindungan petani juga menjadi hal yang penting untuk mendapatkan perhatian.

Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat serta penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Hal lain yang perlu untuk diwaspadai diantaranya penanganan masalah dampak perubahan iklim dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.

#### **2. Daya Saing Produk Pertanian**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka peningkatan daya saing produk pertanian yaitu masih tingginya angka susut hasil produk pertanian utamanya padi serta masih rendahnya daya saing produk pertanian dan perkebunan memasuki pasar global dan jejaring pemasaran baik dalam skala nasional maupun internasional.

### 3. Kelembagaan dan SDM Pertanian

Kualitas SDM pertanian menjadi faktor penting dalam perwujudan pembangunan pertanian. Hal-hal yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu rendahnya minat generasi muda dalam pertanian, masih perlunya peningkatan kualitas SDM petani utamanya dalam penguasaan teknologi dan penerapan budidaya pertanian yang baik guna mendukung keberlanjutan budidaya pertanian. Peningkatan peran penyuluh sebagai pendamping petani sangat penting, untuk itu kualitas SDM penyuluh patut untuk mendapatkan perhatian.

Selain itu kelembagaan petani juga perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam rangka perwujudan pertanian berkelanjutan dari sisi hulu sampai dengan hilir. Hal lain yang tidak kalah penting adalah optimalisasi kemitraan antara petani, kelompok tani, pemerintah dan dunia usaha.

#### **1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Sumber daya manusia pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah aparat Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2023 sebanyak 578 orang PNS. Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat lulusan Pasca Sarjana (S3) sebanyak 1 orang, (S2) sebanyak 54 orang, Sarjana/Diploma IV (S1/DIV) 255 orang, Sarjana Muda/DIII 62 orang, DII/D1 6 orang, SLTA 200 orang, dan SLTP 20 orang sertalulusan SD 13 orang.
2. Komposisi pegawai terdiri dari pejabat struktural 53 orang yang terdiri dari Eselon II (1 orang), Eselon III (13 orang), Eselon IV (13 orang), sedangkan jumlah pejabat fungsional terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 22 orang;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 7 orang;
  - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) , jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 2 (dua) orang;

- d. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 86 orang;
- e. Jabatan Fungsional Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 120 orang, PPPK (Formasi Penyuluh Pertanian) sebanyak 75 orang dan Tenaga Bantu POPT sebanyak 99 orang;
- f. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 1 (satu) orang;
- g. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 1 (satu) orang;
- h. Jumlah Non ASN yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk sumber daya sarana prasarana pendukung bagi aparat untuk menunjang pembangunan pertanian dan perkebunan masih terbatas terutama bagi aparat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut :

1. Balai Pelatihan Pertanian terletak di Pringsurat Soropadan, Temanggung

Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Sarana Prasarana Balai Pelatihan Pertanian**

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Lokasi/Unit/Set)	Keterangan
1	Gedung Administrasi	2	-
2	Asrama	4	174 orang
3	Ruang Makan	3	250 orang
4	Gedung Serbaguna	1	200 orang
5	Gudang Alsintan	1	-
6	Laboratorium Pengolah Hasil	1	-
7	Laboratorium Agensia Hayati	1	-
8	Kebun/Lahan Praktek :		
	- Lahan Kering (tegalan)	12.628 m <sup>2</sup>	-
	- Lahan Sawah	8.387 m <sup>2</sup>	-
9	Kolam Ikan	3	-
10	Kandang Ternak	1	-
11	Guest House	-	-
12	Tempat Ibadah	1	300 orang
13	Lapangan Olahraga	2	-
14	Rumah Dinas	12	-
15	Ruang Kelas	4	160ang
16	Cottage	5	10 kamar / 30 orang

## 2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) berada di Jalan Solo-Yogyakarta Km. 15 Sragen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Bangunan yang dimiliki berupa gedung permanen (kantor induk), gedung laboratorium pengujian mutu benih, dan gedung kantor 6 Pos Pengawas Benih (PPB) di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu PPB Wilayah Semarang di kompleks Tarubudaya Ungaran, PPB Wilayah Pati di Kabupaten Pati, PPB Wilayah Surakarta di Kabupaten Sukoharjo, PPB Wilayah Pekalongan di Kabupaten Pemalang, PPB Wilayah Kedu di Kabupaten Magelang dan PPB Wilayah Banyumas di Kabupaten Banyumas.

**Tabel 1.2**  
**Sarana Prasarana Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih**

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Luas/unit/set, dll)	Keterangan
1	Kantor Induk BPSB	1	
2	Laboratorium Pengujian Mutu Benih	1	
3	PPB Wilayah Semarang	1	
4	PPB Wilayah Pati	1	
5	PPB Wilayah Surakarta	1	

## 3. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang

BBTPH Wilayah Semarang terletak di Komplek Tarubudaya, dengan wilayah kerja meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan komoditas dan luas lahan yang di usahakan berbeda-beda. Komoditas yang di usahakan antara lain padi, palawija dan hortikultura.

**Tabel 1.3**  
**Sarana Prasarana BBTPH Wilayah Semarang**

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas Total (ha)	Luas Produktif (ha)	Lokasi
1	KBP Banyubiru	Padi	6,00	5,00	Banyubiru, Kab. Semarang
2	KBP Ketitang	Padi	8,20	7,0	Ketitang, Godong, Kab. Grobogan
3	KBP Wonoketingal	Padi	10,18	8,50	Wonoketingal, Karanganyar, Demak

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas Total (ha)	Luas Produktif (ha)	Lokasi
4	KBP Sendang Sikucing	Padi	20,00	18,50	Sendang Sikucing, Rowosari, Kendal
5	KBP Winong	Padi	8,3935	6,50	Winong, Winong Pati
6	KBP Sonobijo	Padi	6,6	6,0	Jl. Blora-Randublatung Km2 Blora
7	KBH Bandungan	Hortikultura	1,13	0,8	Kenteng, Ambarawa, Kab
8	KBH Karang Duren	Hortikultura	2,52	2,5	Karang Duren, Tengaran, Semarang
9	KBH Kopeng	Hortikultura	0,9	0,6	Kopeng, Getasan, Kab Semarang
10	KBH Sumur Jurang	Hortikultura	3,44	1,5	Sumur Jurang, Gunung Pati, Kota Semarang
11	KBH Karang Geneng	Hortikultura	12	12,0	Karang Geneng, Gunung Pati, Semarang
12	KBH Katonsari	Hortikultura	2,77	0,5	Katonsari, Demak Kota Demak
13	KBH Bulu	Hortikultura	14,6	10,0	Bulu, Rembang
14	KBH Sidokerto	Hortikultura	9,7	7,08	Sidokerto, Pati
15	KBPAl Rendole	Palawija	10,25	8,4	Muktiharjo, Margorejo, Pati
16	KBPAl Kalinyamat	Padi dan Palawija	15,2	11,7	Kalinyamatan, Jepara
Jumlah			131,88	106,59	

4. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta  
BBTPH Wilayah Surakarta terletak di Jl. Slamet Riyadi 386 Solo dengan wilayah kerja meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Komoditas dan luas lahan yang di usahakan antara lain padi, palawija dan hortikultura.

**Tabel 1.4**  
**Sarana Prasarana BBTPH Wilayah Surakarta**

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas (ha)	Lokasi
1	KBTPH. Tegalgondo	Padi	6,0	Sraten, Gatak, Sukoharjo
2	KBTPH. Banyudono	Padi	3,0	Kuwiran, Banyudono, Boyolali
3	KBTPH. Tohudan	Hortikultura	4,0	Tohudan, Colomadu, Karanganyar
4	KBTPH. Sonobijo	Padi	12,0	Klaruhan, Palur, Sukoharjo

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas (ha)	Lokasi
5	KBTPH. Lawu I	Padi	8,0	Lawu, Nguter, Sukoharjo
6	KBTPH. Masaran	Padi	6,0	Masaran, Sragen
7	KBTPH Tawangmangu	Hortikultura	2,0	Tawangmangu, Karanganyar
8	KBTPH. Tejomantri	Hortikultura	0,65	Wonorejo, Sukoharjo
9	KBTPH. Pendem	Hortikultura	16,0	Pendem, Mojogedang, Karanganyar
10	KBTPH. Sidoharjo	Palawija	4,0	Kayuloko, Sidoharjo, Wonogiri
11	KBTPH. Payaman	Hortikultura	3,0	Payaman, Magelang
12	KBTPH.. Salaman	Hortikultura	6,0	Menoreh, Salaman, Magelang
13	KBTPH. Sri Widodo	Padi	5,0	Prembun, Kebumen
14	KBTPH. Kaloran	Hortikultura	19,0	Kaloran, Temanggung
15	KBTPH. Sri Makarti	Padi	7,5	Kedu, Temanggung
16	KBH Kledung	Hortikultura	7,0	Kledung, Temanggung
Jumlah			109,15	

5. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas  
BBTPH Wilayah Banyumas terletak di Jl. Ahmad Yani 23 A, Purwokerto dengan wilayah kerja meliputi 11 kebun benih tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota.

**Tabel 1.5**  
**Sarana Prasarana BBTPH Wilayah Banyumas**

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas (ha)	Lokasi
1	KBTP Maos	Padi	11,58	Jl. Raya Maos No. 462, Cilacap
2	KBTP Petarukan	Padi	12,76	Jl. Raya Kebunsari Petarukan, Pemalang
3	KBTP Gamer	Padi	12,25	Jl. Patimura No. 1 Gamer, Pekalongan
4	KBTPH Kramat	Padi dan Bawang Merah	7,94	Jl. Raya Kramat, Tegal
5	KBTP Bojongsari	Padi	10,00	Jl. Bojongsari, Kembaran, Banyumas
6	KBTP Kalicacing	Palawija	10,11	Desa Alimandi, Banjarnegara
7	KBTP Harjosari	Palawija	6,72	Jl. Raya Harjosari Kidul, Adiwerna, Tegal
8	KBH	Hortikultura	3,05	Jl. Raya Karanganyar,

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas (ha)	Lokasi
9	Karanganyar KBH Rowobelang	Hortikultura	47,80	Kajen, Pekalongan
10	KBTPH Kandeman	Palawija dan Hortikultura	70,83	Desa Rowobelang, Batang Jl. Raya Kandeman Kabupaten Batang
11	KBH Baturaden	Hortikultura	0,35	Jl. Wisata No. 64 Baturraden, Banyumas
	Jumlah		193,39	

#### 6. Balai Benih Tanaman Perkebunan

Balai Benih Tanaman Perkebunan melakukan kegiatan perbenihan baik berupa pembibitan maupun kebun induk/entres komoditas perkebunan. Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai Kebun Dinas sebanyak 32 kebun.

**Tabel 1.6**  
**Sarana Prasarana Balai Benih Tanaman Perkebunan**

No	Kebun Dinas	Komoditas	Luas (ha)	Lokasi
1	Adinuso	Teh, Cengkeh, kopi	8,10	Batang
2	Bantarangin	Tebu	9,60	Wonogiri
3	Binangun	Calon KI Kelapa Genjah	3,68	Purbalingga
4	Bulu	Randu,	20,02	Rembang
5	Bulukerto	Kakao, Kelapa	1,32	Wonogiri
6	Giriwarno	Kakao, Kelapa	2,24	Wonogiri
7	Gombong	Teh, Kopi Arabika	8,34	Pemalang
8	Jangglengan	Tebu	18,03	Sukoharjo
9	Jragan	Kopi	0,93	Temanggung
10	Kaliwiro	Calon KI Kelapa Kopyor, Kopi Tebu	9,46	Wonosobo
11	Kaliombo	Tebu, kakao, Kopi	21,00	Rembang
12	Karanganyar	Kopi, Lada, Kakao	6,00	Pekalongan
13	Karanggedong	Teh, Kopi	7,45	Temanggung
14	Karangreja	Kebun Induk Lada, Kelapa	8,39	Purbalingga
15	Limpakuwus	Kopi Robusta Kopi Robusta	10,89	Banyumas

No	Kebun Dinas	Komoditas	Luas (ha)	Lokasi
16	Mento	Kopi Arabika	5,00	Temanggung
17	Ngagrong	Kebun Induk Vanili, Lada Cabe	4,00	Boyolali
18	Ngawen	Jawa Kelapa, Bibit Kopi	4,57	Salatiga
19	Noborejo	Kopi, Teh	4,00	Salatiga
20	Pagenteran	Kopi, Kelapa	2,00	Pemalang
21	Redin	Kopi	12,89	Purworejo
22	Sedayu	Kakao, Kelapa	2,40	Wonosobo
23	Selorejo	Kopi, Kakao, Kelapa	1,40	Wonogiri
24	Sidoharjo	Cengkeh, Teh	1,37	Wonogiri
25	Surjo	Teh	1,93	Batang
26	Surojoyo	Entres Kopi, Kebun Induk	6,30	Wonosobo
27	Tanggulrejo	Kakao, Kopi, Kelapa Teh	8,02	Magelang
28	Wanayasa	Tebu, Jambu Mete	5,87	Banjarnegara
29	Wuryantoro	Calon kebun induk kelapa, Tebu,	10,52	Wonogiri
30	Wonorejo	Kakao	156,40	Batang
31	Pirikan	Kakao	0,50	Magelang
32	Watuaji	Karet	2,50	Jepara
		Jumlah	365,12	

7. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHP) berada di Komplek Tarubudaya Ungaran. Selain memiliki kantor di kompleks Tarubudaya, BPTPH juga memiliki Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) yang tersebar di 6 wilayah eks Karesidenan dan 1 Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Perkebunan yaitu : Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Semarang Kabupaten Semarang; Laboratorium

Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pati Kabupaten Pati; Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo; Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pekalongan, Kabupaten Pemalang; Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Kedu Kabupaten Temanggung; Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Banyumas, Kabupaten Banyumas; dan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Perkebunan Kota Salatiga.

**Tabel 1.7**  
**Sarana Prasarana Balai Perlindungan TPHP**

<b>No</b>	<b>Fasilitas Kantor</b>	<b>Jumlah (Luas/unit/set)</b>	<b>Keterangan/ Wilayah Kerja</b>
1	Kantor Induk BTPPH		
2	LPHP Semarang	Luas Bangunan : 265 m <sup>2</sup> Luas Lahan : 265 m <sup>2</sup>	4 KABUPATEN, 2 KOTA dan 92 KECAMATAN : KOTA SEMARANG (16 KECAMATAN) KAB. SEMARANG (19 KECAMATAN) DEMAK (14 KECAMATAN) GROBOGAN (19 KECAMATAN) KENDAL (20 KECAMATAN) KOTA SALATIGA (4 KECAMATAN)
3	LPHP Pati	Luas Bangunan : 629 m <sup>2</sup> Luas Lahan : 903 m <sup>2</sup>	5 KABUPATEN dan 76 KECAMATAN : PATI (21 KECAMATAN) KUDUS (9 KECAMATAN) JEPARA (16 KECAMATAN) BLORA (16 KECAMATAN) REMBANG (14 KECAMATAN)
4	LPHP Surakarta	Luas Bangunan : 779 m <sup>2</sup> Luas Lahan : 4020 m <sup>2</sup>	6 KABUPATEN, 1 KOTA dan 118 KECAMATAN : 1. WONOGIRI (21 KECAMATAN) 2. BOYOLALI (21 KECAMATAN) 3. SUKOHARJO (13 KECAMATAN) 4. SRAGEN (20 KECAMATAN) 5. KLATEN (26 KECAMATAN) 6. KARANGANYAR (16 KECAMATAN) 7. KOTA SURAKARTA (1 KECAMATAN)

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Luas/unit/set)	Keterangan/ Wilayah Kerja
5	LPHP Pekalongan	Luas Bangunan : 437 m <sup>2</sup> Luas Lahan : 978 m <sup>2</sup> Luas Lahan Percobaan : 19.116 m <sup>2</sup>	5 KABUPATEN, 2 KOTA dan 91 KECAMATAN : 1. BREBES (17 KECAMATAN) 2. TEGAL (19 KECAMATAN) 3. KOTA TEGAL (3 KECAMATAN) 4. PEMALANG (14 KECAMATAN) 5. PEKALONGAN (19 KECAMATAN) 6. KOTA PEKALONGAN (4 KECAMATAN) 7. BATANG (15 KECAMATAN)
6	LPHP Kedu	Luas Bangunan : 629 m <sup>2</sup> Luas Lahan : 903 m <sup>2</sup>	5 KABUPATEN, 1 KOTA dan 101 KECAMATAN : 1. KOTA MAGELANG (3 KECAMATAN) 2. MAGELANG (21 KECAMATAN) 3. WONOSOBO (15 KECAMATAN) 4. TEMANGGUNG (20 KECAMATAN) 5. PURWOREJO (16 KECAMATAN) 6. KEBUMEN (26 KECAMATAN)
7	LPHP Banyumas	Luas Bangunan : 629 m <sup>2</sup> Luas Lahan : 903 m <sup>2</sup>	4 KABUPATEN dan 87 KECAMATAN : 1. CILACAP (24 KECAMATAN) 2. PURBALINGGA (18 KECAMATAN) 3. BANJARNEGARA (18 KECAMATAN) 4. BANYUMAS (27 KECAMATAN)

Pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 224.272.214.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 213.205.112.087,- dan realisasi fisik sebesar 99,48% untuk melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja. Realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan adanya sisa gaji dan tunjangan, sisa kontrak pengadaan barang/jasa, sisa hibah yang tidak lolos verifikasi dan efisiensi belanja lainnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2023 terdiri dari 4 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan rincian sebagai berikut:

### Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tujuan sasaran, indikator kinerja OPD, Perjanjian Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan, Instrumen Pendukung Lampiran Kinerja.

### Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan analisis capaian kinerja kantor serta akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran).

### Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

## 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Pada tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas Pertanian dan Perkebunan terhadap proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai hasil evaluasi sebesar 80,70 termasuk dalam kategori penilaian A (Memuaskan) dengan interpretasi unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Terdapat dua saran/rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang tersaji pada Tabel 1.8 sebagai berikut :

**Tabel 1.8**  
**Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun instrumen penilaian kinerja yang sistematis dan terukur sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Instrumen penilaian kinerja yang sistematis dan terukur telah ditindaklanjuti dan disusun
2	Memfaatkan informasi rekomendasi dalam LKjIP untuk penyesuaian perencanaan aktivitas dan melaporkan progres pelaksanaan rekomendasi dalam laporan kinerja periode berikutnya	Rekomendasi LKjIP Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dan progres pelaksanaan rekomendasi telah dilaporkan melalui LKjIP Tahun 2023 yang disusun sesuai aturan, serta evaluasi capaian kinerja telah ditindaklanjuti untuk dasar perencanaan tahun 2024

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan landasan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu lima tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan.

##### 1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu :

**“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapus*”**

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

##### a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan

aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang disediakan secara cukup dan menerus untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

**2. Misi**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

**1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan masyarakat gotong royong.

## **2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan kabupaten/kota.**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal berlandaskan nilai “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas hingga pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan

kelembagaan yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

### **3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.**

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat. Program pengentasan kemiskinan kedepan juga diarahkan pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

### **4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.**

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang

mampu bersaing secara kompetitif. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

#### **Tujuan 1 : Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan**

##### **Sasaran :**

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan.

#### **Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah**

##### **Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan serta indikator dan target kinerja yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan :						
			Padi	Ton	11.543.015	11.629.588	11.716.810	11.804.686	11.893.221
			Jagung	Ton	3.660.360	3.675.002	3.689.702	3.704.460	3.719.278
			Kedelai	Ton	102.726	104.940	107.201	109.512	111.872
			Bawang Merah	Ton	528.537	550.276	572.016	593.756	615.495
			Cabe Besar	Ton	200.836	209.232	217.628	226.024	234.420
			Tebu	Ton	2.934.025	2.948.695	2.963.438	2.978.255	2.993.147
			Kopi	Ton	20.482	21.019	21.556	22.093	22.629
		Kelapa	Ton	164.248	165.069	165.895	166.724	167.558	
		Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah peningkatan SDM pertanian dan perkebunan	Orang	3.450	3.510	3.570	3.600	3.690
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	60	61,50	63	63,50	64
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	75	75,40	75,70	76	76,20

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan yaitu memantapkan produksi pertanian berkelanjutan, dengan indikator kinerja pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan. Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat.

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dan terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan dengan indikator kinerja jumlah peningkatan SDM pertanian. Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan beserta indikator kerjanya disajikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan :  Padi Jagung Kedelai Bawang Merah Cabe Besar Tebu Kopi Kelapa	  Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	  11.893.221 3.719.278 111.872 615.495 234.420 2.993.147 22.629 167.558

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah peningkatan SDM pertanian dan perkebunan	Orang	3.690
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	64
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,20

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan disajikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</li> <li>2. Melaksanakan penambahan/ rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</li> <li>3. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan mitigasi akibat bencana alam banjir dan kekeringan</li> <li>4. Optimalisasi kebun benih dan sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat</li> <li>5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi pertanian</li> <li>6. Meningkatkan pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran</li> <li>7. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</li> <li>8. Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi</li> <li>2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</li> <li>3. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan</li> <li>4. Penerapan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP)</li> <li>5. Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui balai benih dan optimalisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li> <li>6. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam banjir dan kekeringan</li> <li>7. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui promosi pemasaran</li> <li>8. Menyiapkan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan</li> <li>9. Menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian</li> </ol>
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM petani, kelembagaan petani untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan	Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan administrasi pelayanan	Penguatan infrastruktur pertanian
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Penguatan infrastruktur pertanian

### **2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Perkebunan telah melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi sebesar Rp.224.272.214.000 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.124.743.435.000;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.70.749.698.000;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.7.703.842.000;
4. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.14.959.248.000;
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.115.991.000.

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2023**

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	751.200.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	8 Dokumen	751.200.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	123.992.235.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	86.200.971.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	149.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 Dokumen	1.777.122.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	6.910.100.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Dokumen	4.035.730.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Dokumen	24.894.312.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai	2,90%	2.469.500.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengembangan padi	2.000 Ha	844.500.000
			Pengembangan Jagung dan Serealia	800 Ha	762.500.000
			Pengembangan kedelai	330 Ha	862.500.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati, dan jahe	10,80%	2.218.582.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengembangan bawang merah	10 Ha	718.800.000
			Pengembangan sayuran lainnya	10 Ha	329.332.000
			Pengembangan cabe	21 Ha	198.500.000
			Pengembangan buah durian	4 Ha	171.175.000
			Pengembangan buah lainnya	17 Ha	315.125.000
			Pengembangan melati	2 Ha	58.500.000
			Pengembangan tanaman hias lainnya	1 Ha	96.000.000
			Pengembangan jahe	4 Ha	279.000.000
			Pengembangan tanaman obat lainnya	2 Ha	52.150.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa	3,10%	16.837.140.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kopi	60 Ha	441.925.000
			Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman rempah dan penyegar lainnya	38 Ha	199.250.000
			Fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu	300 Ha	580.955.000
			Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kelapa	30 Ha	296.660.000
			Fasiltasi sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya	2.500 Ha	15.171.400.000
			Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya	30 Ha	146.950.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase penambahan jumlah alsintan	4%	19.305.040.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Penambahan sarana pra panen	100 Unit	18.481.500.000
			Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel	100 Unit	823.540.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah	5%	2.100.000.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Asuransi pertanian	15.000 Ha	2.100.000.000
	Penyediaan dan Pengembangan		Persentase penyaluran pupuk subsidi	100%	838.625.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Sarana Pertanian				
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi	35 Kab/Kota	130.000.000
			Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan	200 Ha	708.625.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolah hasil	2,50%	10.498.307.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Informasi harga pasar	35 Kab/Kota	300.000
			Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil	6 Kelompok	9.640.307.000
			Starup kewirausahaan	6 Unit	558.000.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase layanan sertifikasi benih	100%	2.314.504.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sertifikasi benih padi	5.400 Ha	1.286.874.000
			Sertifikasi benih palawija	1.100 Ha	152.630.000
			Sertifikasi benih hortikultura sayuran	100 Ha	550.000.000
			Pengawasan peredaran benih	12 Bulan	175.000.000
			Pengujian laboratorium	1.130 Lembar	150.000.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	3%	3.850.000.000
		Pengawasan Peredaran Sarana	Perbanyak benih padi	86 Ha	2.830.000.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Pertanian			
			Perbanyak/pengembangan palawija	9,99 Ha	170.000.000
			Perbanyak/pengembangan benih buah-buahan	4.000 Batang	675.000.000
			Perbanyak benih sayuran	0,70 Ha	100.000.000
			Pengembangan sayuran	1 Ha	50.000.000
			Pengembangan tanaman hias	5.000 Batang	25.000.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Surakarta	3%	4.200.000.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyak benih padi	64 Ha	2.208.385.000
			Perbanyak benih kedelai	5 Ha	91.615.000
			Perbanyak tanaman buah	29 Ha	997.448.000
			Perbanyak benih sayuran	4 Ha	552.552.000
			Revitalisasi kebun benih tanaman pangan	1 Unit	200.000.000
			Revitalisasi kebun benih hortikultura	1 Unit	150.000.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	3%	3.154.000.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyak benih padi	40 Ha	1.644.009.000
			Perbanyak benih palawija	8 Ha	321.991.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
			Perbanyakkan bawang merah	0,50 Ha	62.324.000
			Perbanyakkan benih buah-buahan	1.000 Batang	1.053.770.000
			Pengembangan tanaman hias	50 Batang	71.906.000
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	3%	2.964.000.000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyakkan benih tanaman perkebunan	124.000 Batang	605.459.000
			Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan	1 Lokasi	780.161.000
			Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (lokasi kebun dinas)	25 Lokasi	1.578.380.000
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	18,88%	7.538.226.000
		Penataan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	8 Unit	938.226.000
			Irigasi Perpipaan/perpompaan/springkel	375 Unit	6.600.000.000
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran dan sarana pasca panen	2 Kelompok	165.616.000
4	Penyuluhan Pertanian		Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	10%	8.459.248.000
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian	250 Orang	573.548.000
		Pengembangan Penerapan	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	0,33%	7.385.700.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Penyuluhan Pertanian			
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Penumbuhan dan pengembangan korporasi	3 Unit	500.000.000
	Penyuluhan Pertanian		Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	100%	6.500.000.000
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian	1.130 Orang	3.800.000.000
			Tercapainya sasaran teknis sumber daya manusia pertanian	1.350 Orang	2.700.000.000
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	2,10%	6.115.991.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian OPT Tanaman Pangan	30 Unit	526.000.000
			Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	27 Unit	325.000.000
			Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	24 Unit	4.864.991.000
			Perbanyak gen pengendali hayati dan pestisida nabati	1.250 Kg	400.000.000

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2023. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tujuan strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah. Perjanjian kinerja tersebut disusun selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2023 secara lengkap tercantum pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

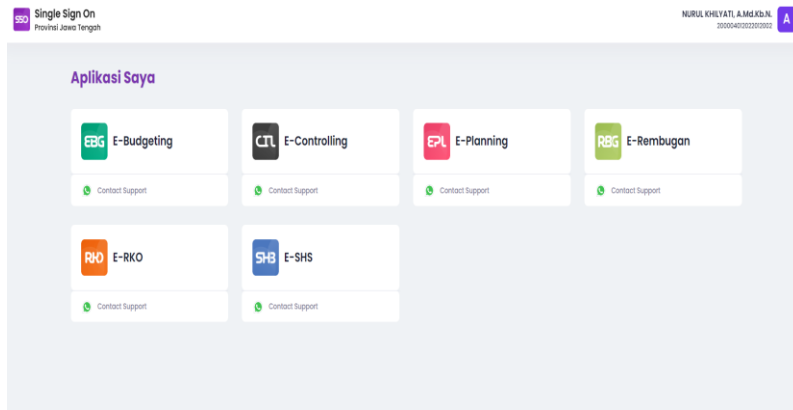
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan	Pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan	%	1,15
1.1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : Padi Jagung Kedelai Bawang merah Cabe Besar Tebu Kopi Kelapa	Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	11.893.221 3.719.278 111.872 615.495 234.420 2.993.147 22.629 167.558
1.2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah peningkatan SDM pertanian	Angka	3.690
2	Meningkatkan tata kelola Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	64
2.1	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	64
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,20

## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung pencapaian kinerja dan penerapan SAKIP yang optimal sebagai perwujudan *good governance*, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan menggunakan instrumen-instrumen pendukung sebagai berikut :

### 1. *Government Resources Management System (GRMS)*

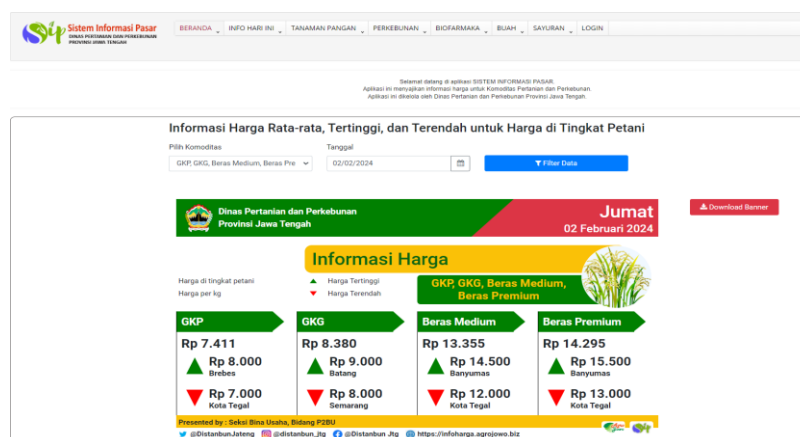
Merupakan sistem aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas e-Planning, e-Budgeting, e-RKO, e-SHB, e-Rembukan, e-Penatausahaan, dan e-Controlling yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyusunan Standar Harga Barang (SHB), pengelolaan kas keuangan, dan pelaporan.



Sumber : <https://sso.jatengprov.go.id/>  
Gambar 2.1 Aplikasi GRMS

## 2. SIP (Sistem Informasi Pasar)

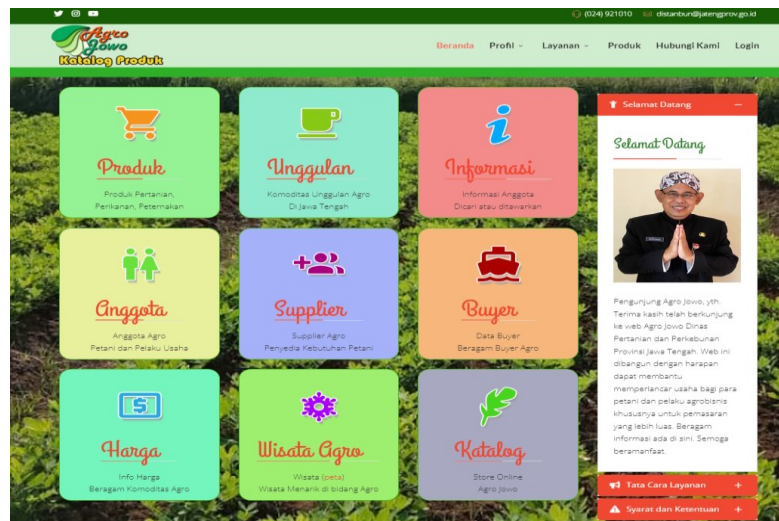
Merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mencatat harga komoditas pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah. Harga komoditas ini dibagi menjadi dua jenis harga yaitu harga eceran dan harga produsen atau harga ditingkat petani. Pencatatan harga ini dilakukan oleh petugas informasi pasar (PIP) di setiap kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah. Dengan informasi harga yang cepat dan akurat, maka data ini dapat digunakan untuk mengawasi fluktuasi harga sehingga harga komoditas dapat dikendalikan dengan baik. Selain untuk kepentingan pihak pemerintah, informasi harga ini juga akan menjadi informasi yang penting bagi para pedagang karena dapat membandingkan harga komoditas yang sama dengan harga-harga yang ada di kabupaten/kota lainnya sehingga menjadi pedoman dalam menentukan harga komoditasnya.



Sumber : <https://infoharga.agrojowo.biz/>  
Gambar 2.2 Aplikasi SIP

### 3. Agro Jowo

Merupakan aplikasi sebagai media untuk pemasaran bagi para petani atau UKM dibidang olahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan, serta para pelaku usaha atau pedagang baik usaha perdagangan dengan penjualan lokal atau ekspor. Melalui aplikasi ini, para petani dapat mencatatkan hasil panen, para pelaku usaha olahan agro dapat memposting produk-produk hasil olahannya, serta para pedagang akan mudah mendapatkan informasi komoditas pertanian dan hasil olahan agro untuk dijual dalam jumlah besar, baik untuk pasar lokal maupun pasar ekspor. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan CV. Oxy Consultant sebagai lembaga konsultan bidang IT. Aplikasi Agro Jowo bisa diakses melalui android dan web.

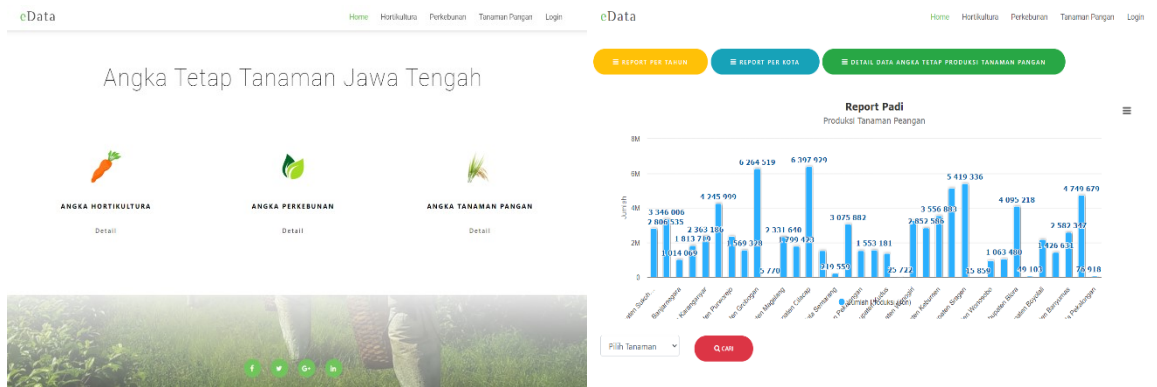


Sumber : <https://agrojowo.distanbun.jatengprov.go.id/>

Gambar 2.3 Aplikasi Agro Jowo

### 4. e-Data

Merupakan sistem informasi yang menyediakan data elektronik dari angka perkembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menetapkan program kerja sekaligus monitoring evaluasi perkembangan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi pertanian.

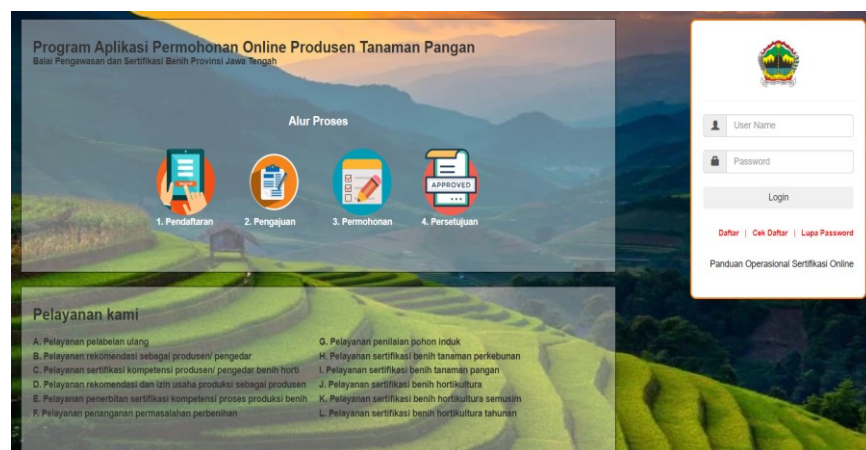


Sumber : <https://edata.distanbun.jatengprov.go.id/>

Gambar 2.4 Aplikasi e-Data

## 5. SINTP (Sertifikasi Online Tanaman Pangan)

Merupakan aplikasi permohonan sertifikasi produk pertanian baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah produsen benih dalam proses sertifikasi benih mulai dari pendaftaran, pengajuan, verifikasi permohonan, pelabelan benih, hingga penerbitan sertifikasi produksi benih.



Sumber : <https://hengqcorp.com/produsen/>

Gambar 2.5 Aplikasi SINTP

## 6. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi)

Merupakan database dokumentasi dan informasi hukum yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam pelaksanaan pemerintahan;

## 7. Berita Resmi Statistik BPS

Merupakan publikasi oleh BPS yang digunakan sebagai basis data untuk perencanaan dan evaluasi kegiatan sektor pertanian.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	> 100%	Sangat Baik
2.	85 – 100%	Baik
3.	65 – 84,99%	Cukup
4.	50 – 64,99%	Kurang
5.	< 50%	Sangat Kurang

Pada Tahun 2023, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Untuk mengukur kinerja sasaran strategis ditunjukkan dengan capaian Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : Padi (Ton) Jagung (Ton) Kedelai (Ton) Bawang Merah (Ton) Cabe Besar (Ton) Tebu (Ton) Kopi (Ton) Kelapa (Ton)

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan sasaran berdasarkan pada target kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan	%	1,15	1,12	97,39	97,39
1.1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan :					
		Padi	Ton	11.893.221	9.058.335	76,16	76,16
		Jagung	Ton	3.719.278	3.564.695	95,84	95,84
		Kedelai	Ton	111.872	87.143	77,90	77,90
		Bawang merah	Ton	615.495	452.160	73,46	73,46
		Cabe Besar	Ton	234.420	234.140	99,88	99,88
		Tebu	Ton	2.993.147	3.283.722	109,71	109,71
		Kopi	Ton	22.629	25.577	113,03	113,03
		Kelapa	Ton	167.558	158.221	94,43	94,43

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1.2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	Orang	3.690	3.690	100	100
<b>2</b>	<b>Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah</b>	<b>Nilai Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Angka</b>	<b>64</b>	<b>82,75</b>	<b>129,30</b>	<b>129,30</b>
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	64	82,75	129,30	129,30
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,20	80,70	105,91	105,91

Berdasarkan setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut diatas, maka dilakukan analisis pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan	1,15	1,12	97,39	Baik	BPS Jawa Tengah
1.1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : Padi Jagung Kedelai Bawang merah Cabe Besar Tebu Kopi Kelapa	11.893.221 3.719.278 111.872 615.495 234.420 2.993.147 22.629 167.558	9.058.335 3.564.695 87.143 452.160 234.140 3.283.722 25.577 158.221	76,16 95,84 77,90 73,46 99,88 109,71 113,03 94,43	Cukup Baik Cukup Cukup Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik	Angka Sementara Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Distanbun Provinsi Jawa Tengah
					92,55	Baik	
1.2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	3.690	3.690	100	Baik	Distanbun Provinsi Jawa Tengah
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	64	82,75	129,30	Sangat Baik	Distanbun Provinsi Jawa Tengah
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	64	82,75	129,30	Sangat Baik	Distanbun Provinsi Jawa Tengah
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,20	80,70	105,91	Sangat Baik	LHE SAKIP Distanbun Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pada tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan Pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan sebesar 97,39% dengan kategori **Baik** yang didukung oleh 2

(dua) sasaran dengan kategori **Baik**. Capaian indikator sasaran kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar 92,55% dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan keterbatasan sumber air dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Kondisi tersebut berpengaruh pada mundurnya jadwal tanam, berkurangnya luas tanam dan luas panen yang mengakibatkan penurunan produksi. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu mitigasi dampak perubahan iklim melalui penggunaan varietas benih super genjah atau berumur pendek dan tahan OPT, percepatan jadwal tanam, penggunaan pupuk organik pembenah hara tanah, optimalisasi sarana irigasi pada wilayah yang masih ada sumber air, dan peningkatan gerakan pengendalian OPT, serta pemanfaatan Agensi Pengendali Hayati (APH) dan pestisida nabati. Sedangkan capaian indikator sasaran jumlah peningkatan SDM pertanian sebesar 100% dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, bimbingan teknis, adopsi teknologi dan hilirisasi pertanian melalui pengembangan korporasi petani.

Adapun capaian indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 129,30% dengan kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan telah terlaksananya pengelolaan pelayanan dan administratif dengan sangat baik, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan capaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat 82,75 yang termasuk kategori **Sangat Baik** dan Nilai SAKIP 80,70 yang juga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) yang sangat baik.

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2020-2022

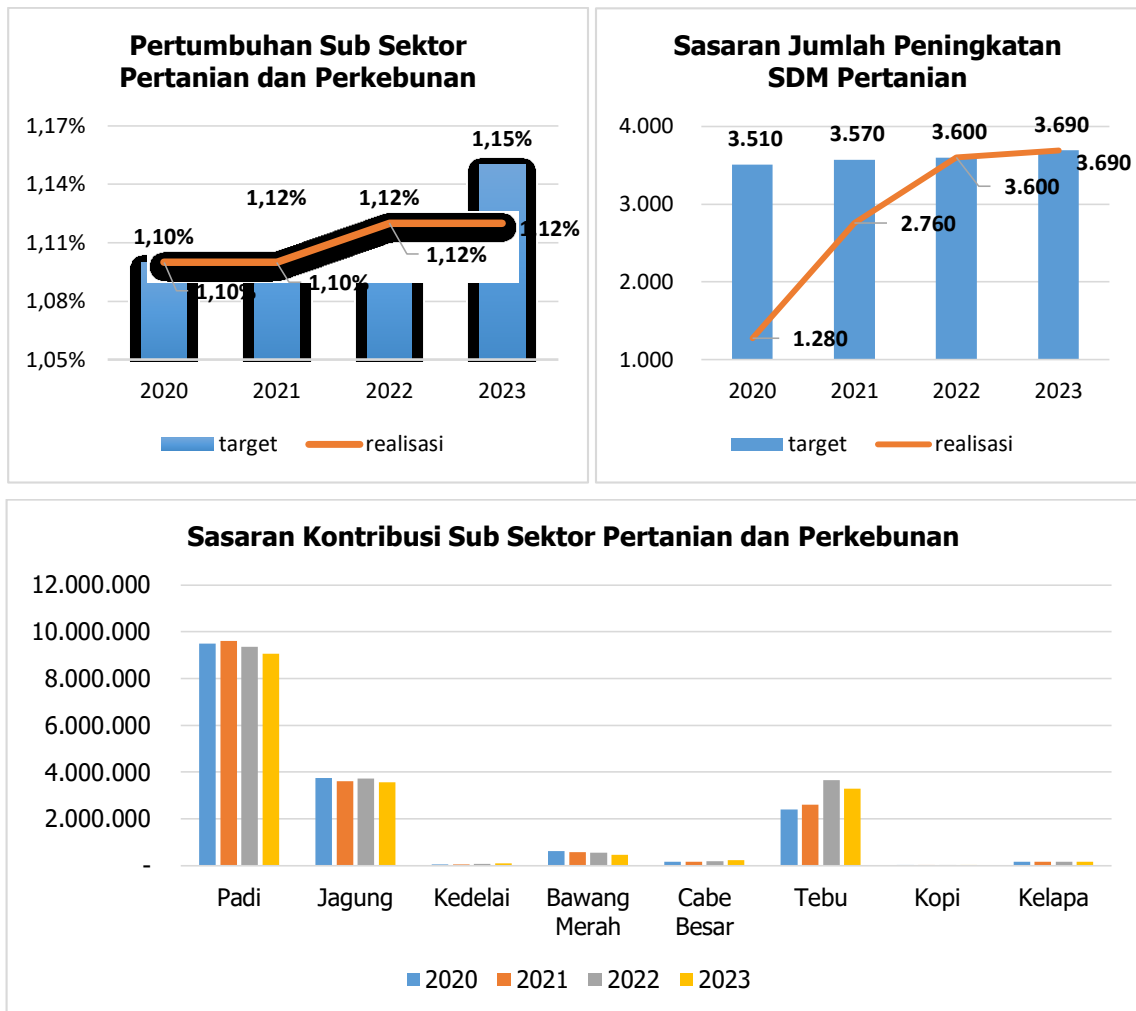
**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan	1,10	1,10	100	1,12	1,10	98,21	1,12	1,12	100	1,15	1,12*	97,39
1.1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan												
		Padi	11.629.588	9.489.165	81,60	11.716.810	9.618.657	82,72	11.804.686	9.356.445	79,26	11.893.221	9.058.335**	76,16
		Jagung	3.675.002	3.750.303	102,05	3.689.702	3.598.264	97,52	3.704.460	3.719.441	100,40	3.719.278	3.564.695**	95,84
		Kedelai	104.940	43.797	41,73	107.201	46.949	43,80	109.512	61.198	55,99	111.872	87.143**	77,90
		Bawang Merah	550.276	611.165	111,07	572.016	564.255	90,78	593.756	556.510	93,73	615.495	452.160**	73,46
		Cabe Besar	209.232	166.260	79,46	217.628	169.282	80,28	226.024	186.722	82,61	234.420	234.140**	99,88
		Tebu	2.948.695	2.394.941	81,22	2.963.429	2.603.736	87,86	2.978.255	3.653.321	122,67	2.993.147	3.283.722**	109,71
		Kopi	21.019	25.999	123,69	21.556	26.549	123,16	22.093	25.541	115,61	22.629	25.577**	113,03
	Kelapa	165.069	174.041	105,44	165.895	170.688	102,89	166.724	159.306	95,55	167.558	158.221**	94,43	
1.2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	3.510	1.280	36,47	3.570	2.760	77,31	3.600	3.600	100	3.690	3.690	100
2	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Kepuasan Masyarakat	61,50	82,75	134,55	63	82,75	131,35	63,50	83	130,71	64	82,75	129,30

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	<b>perangkat daerah</b>													
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	61,50	82,75	134,55	63	82,75	131,35	63,50	83	130,71	64	82,75	129,30
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,40	77	102,12	75,70	80,17	105,90	76	81,37	107,07	76,20	80,70	106,91

Keterangan : \* Angka Realisasi Statistik PDRB BPS Tahun 2022

\*\* Angka Sementara Statistik Pertanian Distanbun Tahun 2023



Gambar 3.1  
Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel 3.5 dan gambar 3.1 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan peningkatan dari 1,10% menjadi 1,12%. Capaian dari tahun 2020 ke 2021 stabil pada angka 1,10%, dan kemudian meningkat menjadi 1,12% pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan pertanian di Jawa Tengah dikategorikan baik karena sektor pertanian menjadi salah satu sektor andalan dan mesin penggerak PDRB, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sasaran kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan yang telah dicapai pada komoditas padi menunjukkan hasil fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebesar 9.489.165 ton dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 9.618.557 ton, kemudian menurun menjadi 9.356.445 ton pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 9.058.335 ton. Penurunan produksi padi

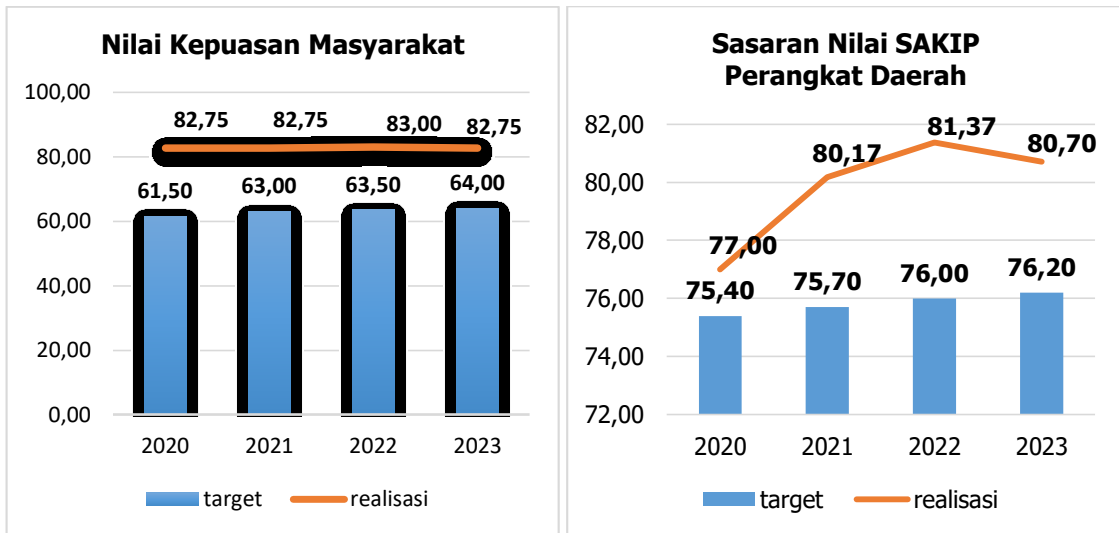
dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim seperti bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 dan fenomena *el nino* yang menyebabkan kekeringan pada tahun 2023. Kondisi tersebut berakibat pada mundurnya jadwalnya tanam, meningkatnya serangan OPT, dan gagal panen (puso) yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas.

Capaian sasaran jagung juga mengalami fluktuasi produksi yaitu tahun 2020 sebesar 3.750.303 ton menurun menjadi 3.598.264 ton pada tahun 2021, dan terjadi peningkatan tahun 2022 menjadi 3.719.441 ton yang kemudian menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 3.564.695 ton. Penurunan produksi dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yang mengakibatkan curah hujan tinggi sehingga menyebabkan bencana banjir dan puso pada tahun 2021 dan tahun 2023 terjadi kondisi kekeringan yang mengakibatkan mundurnya jadwal tanam, dan menurunnya luas tanam dan produksi. Sedangkan capaian sasaran kedelai dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan produksi, namun jika dibandingkan dengan target tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya minat petani dalam budidaya kedelai dari tahun ke tahun karena harga jual yang rendah.

Adapun capaian sasaran bawang merah dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya luas tanam karena berkurangnya minat petani, dan menurunnya produktivitas karena dampak perubahan iklim seperti curah hujan dan kekeringan dan adanya serangan OPT. Disisi lain, komoditas cabe besar justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode pertanaman yang semula monokultur menjadi tumpang sari sehingga menurunkan luas tanam dan produksi.

Untuk sektor perkebunan terdapat penurunan pada komoditas kelapa yang disebabkan beberapa tanaman sudah tua dan tidak menghasilkan. Komoditas tebu juga menurun produksinya dibandingkan dengan target karena usia tanaman (*ratoon*) sudah tua, serta menurunnya minat petani akibat tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil yang diterima. Adapun kopi justru mengalami peningkatan produksi

karena tingginya permintaan pasar yang berbanding lurus dengan meningkatnya minat petani menanam kopi.



Gambar 3.2  
Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel 3.5 dan gambar 3.2 dapat diketahui bahwa realisasi tujuan kedua menunjukkan hasil yang stabil dan meningkat pada tahun 2022, namun selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini disebabkan oleh tata kelola organisasi, kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang sangat baik, sehingga berdampak positif pada nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Selain itu, selalu memperbaiki akuntabilitas kinerja sehingga nilai SAKIP yang didapatkan memuaskan.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target Renstra
<b>1</b>	<b>Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan</b>	<b>Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan</b>	<b>1,12</b>	<b>1,15</b>	<b>97,39</b>	<b>97,39</b>
1.1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : Padi Jagung Kedelai Bawang merah Cabe Besar Tebu Kopi Kelapa	9.058.335 3.564.695 87.143 452.160 234.140 3.283.722 25.577 158.221	11.893.221 3.719.278 111.872 615.495 234.420 2.993.147 22.629 167.558	76,16 95,84 77,90 73,46 99,88 109,71 113,03 94,43	76,16 95,84 77,90 73,46 99,88 109,71 113,03 94,43
1.2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	3.690	3.690	100	100
<b>2</b>	<b>Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah</b>	<b>Nilai Kepuasan Masyarakat</b>	<b>82,75</b>	<b>64</b>	<b>129,30</b>	<b>129,30</b>
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	82,75	64	129,30	129,30
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,70	76,20	105,91	105,91

Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah berhasil mencapai target tahunan bahkan melebihi target. Akan tetapi, realisasi indikator tujuan terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan tidak mencapai target karena adanya penurunan produksi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor alam yaitu dampak perubahan iklim yang menyebabkan bencana banjir dan kekeringan sehingga jadwal tanam mundur dan beberapa tanaman puso. Penyebab lainnya terdapat serangan OPT dan kondisi fisiologis tanaman yang sudah tua sehingga tidak produktif dan menurunkan produktivitas.

**3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah Dilakukan pada Tahun 2023**

**Tabel 3.7**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**  
**dan Solusi yang Dilakukan Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan	1,12	1,15	97,39	Laju pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan belum mencapai target karena adanya penurunan produktivitas yang dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim menyebabkan keterbatasan sumber air dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Penerapan budidaya tanaman sehat sesuai GAP ( <i>Good Agriculture Practices</i> ) dan optimalisasi pemanfaatan sarana irigasi
1.1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan :				Penurunan produksi pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura disebabkan oleh dampak perubahan iklim yaitu kekeringan yang berpengaruh pada mundurnya jadwal tanam, berkurangnya luas tanam dan luas panen, serta meningkatnya serangan OPT	Mitigasi dampak perubahan iklim melalui penggunaan benih unggul bersertifikat, percepatan jadwal tanam, penggunaan pupuk organik pembenah hara tanah, optimalisasi sarana irigasi pada wilayah yang masih ada sumber air, dan peningkatan gerakan pengendalian OPT, serta pemanfaatan Agensi Pengendali Hayati (APH) dan pestisida nabati
		Padi	9.058.335	11.893.221	76,16		
		Jagung	3.564.695	3.719.278	95,84		
		Kedelai	87.143	111.872	77,90		
		Bawang merah	452.160	615.495	73,46		
		Cabe Besar	234.140	234.420	99,88		
		Tebu	3.283.722	2.993.147	109,71		
		Kopi	25.577	22.629	113,03		
		Kelapa	158.221	167.558	94,43		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	3.690	3.690	100	Terdapat peningkatan jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, bimbingan teknis, adopsi teknologi dan hilirisasi pertanian melalui pengembangan korporasi petani	-
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	82,75	64	129,30	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	82,75	64	129,30	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,70	76,20	105,91	Adanya dukungan pencapaian indikator kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan dan dukungan inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja dinas	-

### 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.8**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	<b>Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan</b>	<b>Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan</b>	1,12	1,15	97,39	99.528.779.000	96.248.936.461	96,71	3,29
1.1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : Padi Jagung Kedelai Bawang merah Cabe Besar Tebu Kopi Kelapa	9.058.335 3.564.695 87.143 452.160 234.140 3.283.722 25.577 158.221	11.893.221 3.719.278 111.872 615.495 234.420 2.993.147 22.629 167.558	76,16 95,84 77,90 73,46 99,88 109,71 113,03 94,43	84.569.531.000	81.668.041.794	96,57	3,43
1.2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	3.690	3.690	100	14.959.248.000	14.580.894.667	97,47	2,53

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
<b>2</b>	<b>Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah</b>	<b>Nilai Kepuasan Masyarakat</b>	<b>82,75</b>	<b>64</b>	<b>129,30</b>	<b>124.743.435.000</b>	<b>116.956.175.626</b>	<b>93,76</b>	<b>6,24</b>
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	82,75	64	129,30	123.992.235.000	116.226.133.135	93,74	6,26
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,70	76,20	105,91	751.200.000	730.042.491	97,18	2,82

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk pencapaian target tujuan dan sasaran dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan dengan alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga capaian kinerja tujuan dan sasaran dapat tercapai.

### 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

**Tabel 3.9**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	<b>Memantapkan produksi pertanian berkelanjutan</b>	<b>Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan</b>	<b>97,39</b>				Menunjang
1.1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan :		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai	95,86	Menunjang
		Padi	76,16	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengembangan padi	100	Menunjang
		Jagung	95,84		Pengembangan Jagung dan Sereal	100	Menunjang
		Kedelai	77,90		Pengembangan kedelai	100	Menunjang
		Bawang merah	73,46	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati, dan jahe	91,76	Menunjang
		Cabe Besar	99,88	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengembangan bawang merah	100	Menunjang
		Tebu	109,71		Pengembangan sayuran lainnya	100	Menunjang
		Kopi	113,03		Pengembangan cabe	100	Menunjang
		Kelapa	94,43		Pengembangan buah durian	100	Menunjang
					Pengembangan buah lainnya	100	Menunjang
					Pengembangan melati	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					Pengembangan tanaman hias lainnya	100	Menunjang
					Pengembangan jahe	100	Menunjang
					Pengembangan tanaman obat lainnya	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa	102,26	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kopi	100	Menunjang
					Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman rempah dan penyegar lainnya	100	Menunjang
					Fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu	100	Menunjang
					Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kelapa	100	Menunjang
					Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya	100	Menunjang
					Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penambahan jumlah alsintan	100	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Penambahan sarana pra panen	100	Menunjang
					Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah	100	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Asuransi pertanian	98,61	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyaluran pupuk subsidi	86,70	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi	100	Menunjang
					Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolah hasil	100	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Informasi harga pasar	100	Menunjang
					Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil	100	Menunjang
					Starup kewirausahaan	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase layanan sertifikasi benih	100	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sertifikasi benih padi	109,16	Menunjang
					Sertifikasi benih palawija	177,19	Menunjang
					Sertifikasi benih hortikultura sayuran	981,35	Menunjang
					Pengawasan peredaran benih	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					Pengujian laboratorium	219,27	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	100	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyak benih padi	93,02	Menunjang
					Perbanyak/pengembangan palawija	100,10	Menunjang
					Perbanyak/pengembangan benih buah-buahan	100	Menunjang
					Perbanyak benih sayuran	100	Menunjang
					Pengembangan sayuran	100	Menunjang
					Pengembangan tanaman hias	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Surakarta	79	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyak benih padi	100	Menunjang
					Perbanyak benih kedelai	100	Menunjang
					Perbanyak tanaman buah	100	Menunjang
					Perbanyak benih sayuran	100	Menunjang
					Revitalisasi kebun benih tanaman pangan	100	Menunjang
					Revitalisasi kebun benih hortikultura	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah	153	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Pertanian	Banyumas		
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyak benih padi	100	Menunjang
					Perbanyak benih palawija	112,50	Menunjang
					Perbanyak bawang merah	100	Menunjang
					Perbanyak benih buah-buahan	100	Menunjang
					Pengembangan tanaman hias	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	100	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyak benih tanaman perkebunan	152,58	Menunjang
					Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan	100	Menunjang
					Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (lokasi kebun dinas)	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	137,61	Menunjang
				Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	100	Menunjang
					Irigasi perpipaan/ perpompaan/ springkel	100	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran dan sarana pasca panen	100	Menunjang
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	212,38	Menunjang
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian OPT Tanaman Pangan	100	Menunjang
					Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	100	Menunjang
					Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	100	Menunjang
					Perbanyak gen pengendali hayati dan pestisida nabati	100	Menunjang
1.2	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	100	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	105,80	Menunjang
				Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian	144	Menunjang
				Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	106,06	Menunjang
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Penumbuhan dan pengembangan korporasi	166,67	Menunjang
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	100	Menunjang
				Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan	Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian	100,89	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Pertanian	Tercapainya sasaran teknis sumber daya manusia pertanian	100	Menunjang
<b>2</b>	<b>Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah</b>	<b>Nilai Kepuasan Masyarakat</b>	<b>129,30</b>				Menunjang
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	129,30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	105,91	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	100	Menunjang

Untuk mewujudkan tercapainya kinerja tujuan dan sasaran yang optimal, efektif, dan tepat sasaran, Dinas Pertanian dan Perkebunan memiliki program dan kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang seperti yang tersaji pada tabel 3.9.

#### 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini memiliki 12 indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi 10 indikator dan tinggi 2 indikator. Indikator dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase penambahan jumlah alsintan, Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah, Persentase peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, Persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe, Persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa, Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolah hasil, Persentase layanan sertifikasi benih, Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang, Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas, dan Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan. Indikator dengan capaian tinggi yaitu Persentase penyaluran pupuk subsidi dan Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta.

Permasalahan yang dihadapi yaitu kondisi kekeringan akibat fenomena *el nino* sebagai dampak perubahan iklim pada lahan pertanian yang menyebabkan mundurnya jadwal tanam dan terbatasnya ketersediaan air sehingga menurunkan produksi tanaman. Upaya yang dilakukan yaitu mitigasi dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan melalui penanaman varietas benih super genjah atau berumur pendek, percepatan jadwal tanam, penggunaan pupuk organik pembenah hara tanah, dan optimalisasi sarana irigasi pada wilayah yang masih ada sumber air.

Manfaat pelaksanaan program yaitu menunjang produksi pertanian melalui pemanfaatan sarana pendukung pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

#### 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini memiliki 2 indikator dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase jaringan irigasi yang baik dan Persentase jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya. Permasalahan yang dihadapi yaitu dampak perubahan iklim menyebabkan jaringan dan sarana irigasi tidak dapat

dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang pertumbuhan tanaman akibat sumber air. Upaya yang telah dilakukan yaitu optimalisasi pemanfaatan pompa air, perpipaan, sumur dangkal dan Brigade Alsintan Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di 6 pos wilayah (Pati, Semarang, Surakarta, Kedu, Pekalongan, Banyumas) untuk peminjaman sarana prasarana pertanian.

Manfaat pelaksanaan program yaitu menunjang produksi pertanian melalui pemanfaatan jaringan dan sarana irigasi untuk menyediakan sumber air, serta peningkatan kapasitas SDM petani.

### 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini memiliki 1 indikator dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase penurunan serangan OPT. Permasalahan yang dihadapi yaitu adanya serangan OPT akibat dampak perubahan iklim yang mengganggu pertumbuhan tanaman sehingga menurunkan produktivitas. Upaya yang dilakukan yaitu penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui kegiatan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu), optimalisasi gerakan pengendalian OPT, pengamatan dan peramalan serangan OPT, penggunaan varietas benih bersertifikat tahan OPT, serta pemanfaatan agensi pengendali hayati dan pestisida nabati.

Manfaat dalam pelaksanaan program yaitu menunjang produksi pertanian dengan penanganan dan pengendalian terhadap dampak perubahan iklim dan serangan OPT.

### 4. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini memiliki 2 indikator dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya dan Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih minimnya petani yang menguasai teknologi pertanian terutama pada hilirisasi produk. Sebagian besar petani masih kesulitan dalam pemasaran produk pertanian yang bernilai jual tinggi. Selain itu, masih kurangnya minat petani muda atau millennial untuk mengembangkan usaha pertanian. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pelatihan peningkatan kapasitas petani dalam inovasi teknologi budidaya dan pemasaran produk pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui adopsi teknologi pertanian untuk menunjang kegiatan penyuluhan kepada petani, fasilitasi *e-commerce* Agro Jowo untuk promosi produk petani, fasilitasi startup

kewirausahaan, serta penumbuhan korporasi petani untuk menunjang hilirisasi pertanian.

Manfaat dalam pelaksanaan program yaitu mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani.

#### 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini memiliki 2 indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah, dan Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD. Dalam pelaksanaan program tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat indikator kinerja tersebut menunjang program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara optimal. Manfaat program ini yaitu menunjang terlaksananya dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola perangkat daerah.

Secara umum, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 telah menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan.

### 3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023, didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 224.272.214.000,- dan terealisasi Rp. 213.205.112.087,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	70.749.698.000	68.137.192.837	96,31	99,41
1.1	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	54.267.194.000	51.966.358.734	95,76	99,29
1.2	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	16.482.504.000	16.170.834.103	98,11	99,80
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.703.842.000	7.458.770.870	96,82	99,41
2.1	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	7.703.842.000	7.458.770.780	96,82	99,41
3	Program Penyuluhan Pertanian	14.959.248.000	14.580.894.667	97,47	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
3.1	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	573.548.000	567.029.971	98,86	100
3.2	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	13.885.700.000	13.538.167.696	97,50	100
3.3	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	500.000.000	475.697.000	95,14	100
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	6.115.991.000	6.072.078.177	99,28	100
4.1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	6.115.991.000	6.072.078.177	99,28	100
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	124.743.435.000	116.956.175.626	93,76	99,44
5.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	751.200.000	730.042.491	97,18	100
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.200.971.000	83.760.438.788	97,17	100
5.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.000.000	146.114.780	98,06	100
5.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	15.502.500	62,01	100
5.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.777.122.000	1.763.668.179	99,24	100
5.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.910.100.000	5.850.652.000	84,67	100
5.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.035.730.000	3.789.735.902	93,90	100
5.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.894.312.000	20.900.020.986	83,96	97,20
	Total	224.272.214.000	213.205.112.087	95,07	99,48

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diketahui realisasi serapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 95,07% yang dapat dikategorikan Baik dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga menunjang tercapainya indikator kinerja sasaran.

**Tabel 3.11**  
**Capaian Anggaran per Belanja**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>224.272.214.000</b>	<b>213.205.112.087</b>	<b>95,07</b>	<b>11.067.101.913</b>
1	BELANJA OPERASI	199.332.573.000	193.192.353.119	96,92	6.140.219.881
1.1	Belanja Pegawai	83.061.971.000	80.639.264.892	97,08	2.422.706.108
1.2	Belanja Barang dan Jasa	66.622.742.000	64.943.784.620	97,48	1.678.957.380
1.3	Belanja Hibah	49.647.860.000	47.609.303.607	95,89	2.038.556.393
2	BELANJA MODAL	24.939.641.000	20.012.758.968	80,24	4.926.882.032
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.057.225.000	5.995.294.000	84,95	1.061.931.000
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.092.416.000	13.310.975.118	77,88	3.781.440.882
2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	790.000.000	706.489.850	89,43	83.510.150

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat diketahui terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.067.101.913,- berasal dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Belanja pegawai terdapat sisa gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.422.706.108,- karena beberapa pegawai pensiun dan mutasi.
2. Belanja barang dan jasa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.678.957.380,- dengan rincian :
  - a) Belanja barang : Rp. 371.621.095,-
  - b) Belanja barang : Rp. 868.280.075,-
  - c) Belanja pemeliharaan : Rp. 86.354.505,-
  - d) Belanja perjalanan dinas : Rp. 345.165.465,-
3. Belanja hibah terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.038.556.393,- dengan rincian :
  - a) Hibah barang : Rp. 1.798.556.393,-

Terdapat sisa kontrak pengadaan dan 10 penerima yang tidak lolos verifikasi faktual karena mengundurkan diri, sudah pernah mendapatkan bantuan yang sama pada tahun sebelumnya, dan tidak terdaftar SIMLUHTAN (Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian).

b) Hibah uang : Rp. 240.000.000,-

Terdapat 9 penerima yang tidak lolos verifikasi faktual karena kelompok tidak ditemukan dan tidak terdaftar SIMLUHTAN.

4. Belanja modal terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.926.882.032,- berasal dari sisa kontrak pengadaan barang, sisa lelang konstruksi dan satu kegiatan renovasi bangunan yang putus kontrak karena penyedia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan terkendala *cash flow*.

### 3.3 Inovasi

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pertanian dan Perkebunan telah mengembangkan dan melaksanakan inovasi baik berupa kebijakan maupun sistem informasi. Adapun inovasi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Subsidi Suku Bunga

Kegiatan subsidi suku bunga pinjaman bagi petani didasari oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 972/9 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan Bank Jateng sebagai penyalur subsidi bunga dan PT. Jamkrida Jawa Tengah sebagai penyalur subsidi imbal jasa peminjaman ketika terjadi gagal bayar oleh debitur. Skema pembiayaan subsidi bunga tetap sebesar 11,5% dan subsidi imbal jasa peminjaman sebesar 1,25%. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada petani, khususnya bagi petani yang memiliki lahan dan modal terbatas.

2. Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Tani

Tujuan kegiatan korporasi tani yaitu untuk menumbuhkan kelembagaan petani yang kuat, tidak hanya di sisi hulu (*on farm*), namun juga memiliki sistem yang kuat di sisi hilirnya (*off farm*) yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan daya tawar hasil panen petani. Proses penumbuhan korporasi petani dapat terbentuk menjadi badan usaha seperti koperasi, CV maupun PT sesuai dengan potensi kemampuan SDM dan kebutuhan lembaga usaha. Pada tahun tahun 2023 sudah terbentuk 5 korporasi yaitu :

- a) PT. Kersana Investama Kreasi di Kabupaten Brebes;

- b) CV. Tani Bangun Agro Makmur di Kabupaten Wonosobo;

- c) Koperasi Produsen “Soedirman Organic Indonesia” di Kabupaten Purbalingga;
  - d) Koperasi Produsen Sekar Jaya Jateng di Kabupaten Semarang.
  - e) Koperasi Produsen “Kopi Semarang Serasi” di Kabupaten Semarang.
3. SIP (Sistem Informasi Pasar)
- Merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mencatat harga komoditas pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah dalam rangka mengawasi fluktuasi harga sehingga dapat dikendalikan dengan baik. Pencatatan harga ini dilakukan oleh petugas informasi pasar di setiap kabupaten/kota. Informasi harga ini juga dapat membandingkan harga komoditas yang sama dengan harga yang ada di kabupaten/kota lainnya sehingga menjadi pedoman dalam menentukan harga komoditasnya.
4. Agro Jowo
- Merupakan aplikasi untuk pemasaran bagi para petani atau UKM dibidang olahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan, serta para pelaku usaha atau pedagang baik usaha perdagangan dengan penjualan lokal atau ekspor. Petani dapat mencatatkan hasil panen, para pelaku usaha olahan agro dapat memposting produk-produk hasil olahannya, serta para pedagang akan mudah mendapatkan informasi komoditas pertanian dan hasil olahan agro untuk dijual dalam jumlah besar, baik untuk pasar lokal maupun pasar ekspor.
5. e-Data
- Merupakan sistem informasi yang menyediakan data elektronik dari angka perkembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menetapkan program kerja sekaligus monitoring evaluasi perkembangan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Jawa Tengah.
6. Sertifikasi Online Tanaman Pangan (SINTP)
- Merupakan aplikasi permohonan sertifikasi produk pertanian baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah produsen benih dalam proses sertifikasi benih mulai dari pendaftaran, pengajuan, verifikasi permohonan, pelabelan benih, hingga penerbitan sertifikasi produksi benih.

### 3.4 Penghargaan

Sebagai wujud kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta mendukung pembangunan daerah di bidang pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan pada tahun 2023 telah mendapatkan penghargaan antara lain sebagai berikut :

1. Penghargaan Abdi Bakti Tani dari Kementerian Pertanian RI yang diberikan pada tanggal 17 Agustus 2023 kepada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Utama.
2. Penghargaan Kementerian Pertanian RI yang diberikan pada tanggal Kategori Peringkat I Provinsi Terbaik Program Kartu Tani BRI.
3. Penghargaan Kementerian Pertanian yang diberikan pada tanggal Kategori Peringkat I Provinsi Berkinerja Terbaik Dalam Mendukung Kegiatan dan Anggaran Direktorat Aneka Kacang dan Umbi TA 2023 dan Perencanaan 2024.



Gambar 3.3 Bukti Dukung Penghargaan Tahun 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan urusan pertanian untuk memberikan pelayanan di bidang pertanian pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Selain itu, peran *stakeholder* terkait juga turut berperan dalam pencapaian pembangunan daerah sektor pertanian.

Dengan memperhatikan uraian dan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan kategori **Baik** dan **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian indikator kinerja utama tahun 2023, yaitu :
  - a. Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan, dengan tingkat capaian 97,39% kategori **Baik**;
  - b. Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan tingkat capaian 92,55% kategori **Baik**;
  - c. Jumlah Peningkatan SDM Pertanian, dengan tingkat capaian 100% kategori **Baik**;
  - d. Nilai Kepuasan Masyarakat, dengan tingkat capaian 129,30% kategori **Sangat Baik**;
  - e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan tingkat capaian 105,91% kategori **Sangat Baik**.
2. Total realisasi belanja APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 213.205.112.087,- atau tercapai 95,07% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 224.272.214.000,-.

## 4.2 Rekomendasi

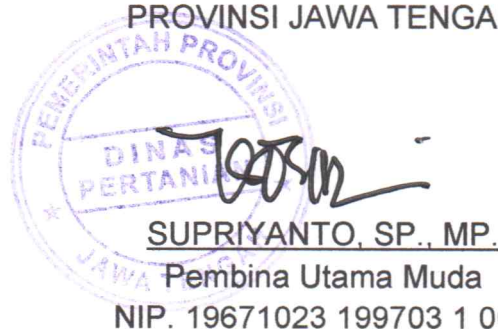
Strategi yang dapat direkomendasikan guna meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna menunjang peningkatan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran;
2. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani dan modernisasi pertanian;
3. Pencegahan, pengendalian, pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) melalui mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan;
4. Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
5. Optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat;
6. Meningkatkan dukungan pada upaya pengendalian inflasi komoditas pertanian penyumbang inflasi seperti bawang merah, cabai, beras dan gula diantaranya melalui penanaman pada bulan-bulan defisit untuk tetap menjaga ketersediaan, mendorong keterlibatan BUMD dan kelompok tani untuk pemenuhan ketersediaan pasokan, serta mitigasi/*early warning system* dampak perubahan iklim dan serangan OPT yang dapat mempengaruhi produksi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dibuat. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan maupun kinerja yang akan datang.

Ungaran,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
SUPRIYANTO, SP., MP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671023 199703 1 002

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jl. Jenderal Gatot Subroto – Tarubudaya – Ungaran, Telp. 024 6924155  
Faksimile 024-6921060 Website <http://distanbun.jatengprov.go.id>  
Surat elektronik : [distanbun@jatengprov.go.id](mailto:distanbun@jatengprov.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIYANTO, SP., MP.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM.

Jabatan : Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, September 2023

Pihak Kedua  
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

  
Drs. NANA SUDJANA, MM.

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
SUPRIYANTO, SP., MP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671023 199703 1 002

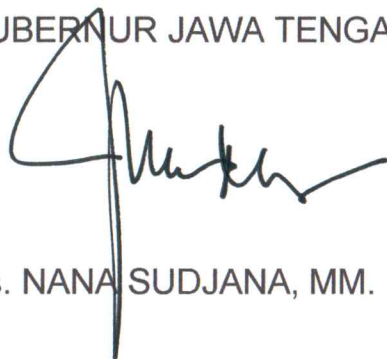
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan 1</b>			
	Memantapkan produksi Pertanian dan Pertanian Berkelanjutan	Pertumbuhan subsektor pertanian dan perkebunan	1,15
<b>Sasaran</b>			
1	Terwujudnya Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Padi	11.893.221
		Jagung	3.719.278
		Kedelai	111.872
		Cabe	234.420
		Bawang merah	615.495
		Tebu	2.993.147
		Kopi	22.629
		Kelapa	167.558
2	Terwujudnya Peningkatan Kemampuan SDM Pertanian dan Perkebunan	Jumlah peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan	3.690
<b>Tujuan 2</b>			
	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	64
<b>Sasaran</b>			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat Distanbun	64
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Distanbun	76,2

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 65.579.500.000,-	APBD
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 7.290.100.000,-	APBD
3. Penyuluhan Pertanian	Rp. 13.910.700.000,-	APBD
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 6.139.991.000,-	APBD
5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 140.703.847.000,-	APBD
6. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 64.787.147.000,-	APBN
7. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 21.337.466.000,-	APBN
8. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 1.993.798.000,-	APBN
9. Dukungan Manajemen	Rp. 7.946.916.000,-	APBN


Semarang, September 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, SP., MP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671023 199703 1 002